

**LAPORAN PENELITIAN EVALUASI
TAHUN ANGGARAN 2015**

JUDUL PENELITIAN:

**STUDI EVALUASI PERAN KOMITE SEKOLAH DITINJAU DARI
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR SE
KABUPATEN BANTUL**

Agenda Penelitian:

3.1 Peningkatan Kualitas Institusi: Kerjasama dan pemberdayaa masyarakat



Ketua

Dr. Ali Mustadi, M. Pd NIP 19780710 200801 1 012

Anggota

Dr. Enny Zubaidah, M.Pd/NIP. 19580822 198403 2 001

HB. Sumardi, M.Pd/NIP 19540515 198103 1 004

Mahasiswa

Fandhi Yusuf/NIM 11108241125

Chandra Adhi Putra/NIM 11108244020

Regina Putri Pratiwi/NIM 11108244065

**Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Penelitian
Antara Dekan dengan Dr. Ali Mustadi, M.Pd**

Nomor Kontrak: 03c/UN34.11/Kontrak-PEP/KU/2015

Tanggal: 20 April 2015

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN EVALUASI**

1. Judul Penelitian : Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Ali Mustadi, M. Pd
- b. Jabatan Fungsional : Lektor
- c. Fakultas/Jurusan/Prodi : FIP/PPSD/PGSD
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
- e. Alamat/Telp : Depok Bantul RT 3, Bantul, Bantul/081328089490

3. Tema Payung Penelitian : 3. Peningkatan Kualitas Institusi

Sub Tema Payung Penelitian: 3.1 Kerjasama dan keterlibatan masyarakat

4. Bidang Keahlian : Pembelajaran Bahasa di SD

5. Tim Peneliti :

| No | Nama dan Gelar | NIP/NIM | Bidang Keahlian Dosen |
|----|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Dr. Enny Zubaidah, M.Pd | 19580822 198403 2 001 | Pembelajaran Bahasa di SD |
| 2 | HB. Sumardi, M.Pd | 19540515 198103 1 004 | Pembelajaran Bahasa di SD |

6. Mahasiswa yang terlibat:

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Fandhi Yusuf | 11108241125 | Mahasiswa PGSD Kampus 2 |
| 2 | Chandra Adhi Putra | 11108244020 | Mahasiswa PGSD Kampus 2 |
| 3 | Regina Putri Pratiwi | 11108244065 | Mahasiswa PGSD Kampus 3 |

7. Lokasi Penelitian : SD Se-Kabupaten Bantul

8. Waktu Penelitian : 6 April s.d 30 September 2015

8. Dana yang diusulkan : 15.000.000

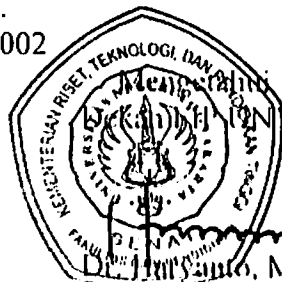
Yogyakarta, 16 Oktober 2015

Ketua Jurusan PPSD,

Ketua Tim Peneliti,

Dra. Hidayati, M. Hum.
NIP 195607211985012002

Dr. Ali Mustadi, M.Pd.
NIP 19780710 200801 1 012



Dra. Hidayati, M. Pd
NIP 19600902 198702 1 001

Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul

Ali Mustadi
aly_uny@yahoo.com

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keterlaksanaan peran komite sekolah ditinjau dari peningkatan mutu pembelajaran di Sekolah Dasar se-Kabupaten Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian evaluative (*Evaluative Research*). Pendekatan evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi model Stake (*Stake's Countenance Model*). Subjek penelitian adalah komite sekolah, kepala sekolah, dan guru SD di Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah responden dengan kondisi berkategori sangat baik untuk pemahaman terhadap rancangan program implementasi komite sekolah sebanyak 25 (23%), kategori baik 14 (13%). Data yang masuk kategori baik sebanyak 36%. Data kategori kurang sebanyak 55 (51%), kategori sangat kurang 14 (13%). Data yang masuk kategori kurang sebanyak 64%. Data termasuk kategori sangat baik sebanyak 11 %, baik sebanyak 47%, kurang sebanyak 20%, dan sangat kurang sebanyak 22%. Jadi data implementasi program komite sekolah yang masuk kategori baik sebanyak 58 % sedangkan yang masuk kategori kurang sebanyak 42%. *Output Phase* atau tahap hasil program mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi implementasi peran Komite Sekolah SD di Kabupaten Bantul. Data input menunjukkan pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah sebesar 36%. Data implementasi program komite sekolah menunjukkan bahwa program komite sekolah telah terlaksana sebanyak 58%. Dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan program komite sekolah sebesar 47%

Kata kunci : Peran komite sekolah, Mutu pembelajaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui pendidikan, manusia akan mengembangkan segala potensinya. Peran penting pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia diakomodasi pemerintah melalui institusi pendidikan, baik formal maupun informal. Pada institusi pendidikan formal, proses pendidikan dilakukan di sekolah. Pendidikan di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran di sekolah oleh guru harus dilaksanakan dengan baik dan bermutu. Pembelajaran yang bermutu berkorelasi dengan mutu luaran pendidikan. Luaran pendidikan yang bermutu pada akhirnya menentukan mutu sumber daya manusia secara umum. Pembelajaran yang bermutu membutuhkan persiapan yang baik. Persiapan tersebut meliputi perencanaan dan pemilihan strategi pembelajaran. Abdul Madjid (2011: 111) menyatakan bahwa proses pembelajaran harus diawali dengan perencanaan yang baik, serta didukung dengan komunikasi yang baik, juga harus didukung dengan pengembangan strategi yang mampu membelajarkan siswa.

Strategi pembelajaran merupakan bagian dari proses perencanaan pembelajaran. Hamzah B. Uno (2006: 3-4) menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran perlu dilakukan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi antara lain (1) untuk memperbaiki mutu pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dalam desain pembelajaran; (2) untuk merancang suatu pembelajaran diperlukan pendekatan sistem; (3) perencanaan desain pembelajaran mengacu pada cara seseorang belajar; (4) untuk merancang suatu desain pembelajaran berdasar pada individu siswa; (5)

pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran, dan tujuan pengiring dari pembelajaran; (6) sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar; (7) perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran dan (8) inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh peran guru dan sekolah. Keterlibatan orangtua dan masyarakat turut memberi sumbangsih dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Orangtua memiliki kepentingan atas hasil belajar anak-anaknya di sekolah. Orangtua juga memiliki peran vital dalam memberi dukungan secara fisik dan mental kepada anak-anaknya di rumah. Masyarakat berperan dalam memberikan akses kepada sekolah atas sumber belajar yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah.

Keterlibatan masyarakat terkait dengan pendidikan di sekolah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 188 ayat (2) dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dirumuskan antara lain (a) penyediaan sumber daya pendidik; (b) penyelenggaraan satuan pendidikan; (c) penggunaan hasil pendidikan; (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan; (e) pengawasan pengelolaan pendidikan; (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Peran masyarakat dan orangtua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan bernama Komite Sekolah. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan tertentu. Syaiful Sagala (2009: 251) menyatakan bahwa Organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki tujuan antara lain (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; (2) meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Mengingat peran penting Komite Sekolah terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran, sekolah perlu menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan oleh sekolah untuk membantu keberhasilan program-program sekolah. Mulyasa (2009: 50) menyatakan bahwa tujuan membina hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain (1) memajukan mutu pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan mutu hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini yaitu bagaimana peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di SD di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di SD di Kabupaten Bantul

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Peran serta masyarakat dan orangtua dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan diwadahi dalam sebuah badan bernama Komite Sekolah. Tatang M. Amirin (2011:29) menyatakan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan didirikan sebagai badan yang mandiri. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komite Sekolah atau madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sara dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah diharapkan tidak menjadi sebuah formalitas semata. Sebagai sebuah badan yang mandiri, Komite Sekolah memiliki komitmen dan loyalitas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Syaiful Sagala (2009:251) menyatakan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang Komite Sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah adalah badan yang mewadahi peran orangtua siswa, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen sekolah yang memiliki komitmen dan loyalitas dalam

peningkatan kualitas pendidikan. Komite Sekolah berdiri sebagai badan mandiri yang menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

2. Tujuan Komite Sekolah

Secara umum Komite Sekolah dibentuk sebagai wadah bagi peran orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walaupun Komite Sekolah dan sekolah merupakan badan yang mandiri, namun kedua badan tersebut tetap harus bekerja sama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dibentuknya Komite Sekolah pasti mempunyai tujuan yang jelas. Secara lebih rinci Syaiful Sagala (2009: 251) menjelaskan bahwa organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Komite Sekolah juga ditujukan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Rusman (2008:512), Komite Sekolah bertujuan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam merumuskan kebijakan sekolah dan program pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu Komite Sekolah juga memiliki tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam menyelenggarakan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dalam buku panduan Komite Sekolah (Depdiknas: 2002), disebutkan bahwa tujuan

Komite Sekolah adalah agar terdapat organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen, loyalitas, dan peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah bertujuan untuk mewadahi peran masyarakat dan orangtua dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Dalam upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pendidikan, masyarakat terlibat dalam aspek pendanaan dan proses manajemen sekolah.

3. Sifat Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai mitra sekolah, komite sekolah harus menjadi badan yang otonom agar memiliki posisi yang sejajar dengan sekolah. Menurut UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propenas) 2000-2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan otonom serta menganut asas kebersamaan dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas Pendidikan maupun lembaga-lembaga lainnya di suatu kabupaten/kota (dalam Syaiful Sagala, 2009: 51). Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (Sri Renani Pantjastuti, 2008: 80-81).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat otonom dan mandiri. Meskipun bersifat otonom dan mandiri, Komite Sekolah tetap menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite Sekolah dan sekolah harus bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah.

4. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Peran masyarakat dan orangtua dalam peningkatan kualitas pendidikan diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah. Sebagai organisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, peran Komite Sekolah diatur oleh pemerintah melalui UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 56. Adapun bunyi Pasal 56 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut,

Pasal 56 ayat (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan. Peran masyarakat meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintah. Peran masyarakat diakomodasi dalam organisasi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Selanjutnya, peran masyarakat melalui dewan pendidikan diatur dalam pasal 56 ayat (2). Adapun bunyi pasal 56 ayat (2) adalah sebagai berikut,

Pasal 56 ayat (2): Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa dewan pendidikan merupakan badan yang mandiri. Dewan pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dewan pendidikan bekerja pada tingkat pendidikan Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota. Selanjutnya, peran masyarakat melalui komite sekolah/madrasah diatur dalam pasal 56 ayat (3). Adapun bunyi pasal 56 ayat (3) adalah sebagai berikut.

Pasal 56 ayat (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa komite sekolah/madrasah merupakan badan yang mandiri. Komite sekolah/madrasah berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Komite sekolah/madrasah berkedudukan pada suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, ketentuan mengenai pembentukan komite sekolah/madrasah dan dewan pendidikan diatur dalam pasal 56 ayat (4). Adapun bunyi pasal 56 ayat (4) adalah sebagai berikut.

Pasal 56 ayat (4): Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan Komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan secara jelas mengatur fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Fungsi dan tugas Komite Sekolah dimuat pada Pasal 196. Adapun bunyi Pasal 196 adalah sebagai berikut.

Pasal 196 ayat (1): Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa komite sekolah/madrasah memiliki fungsi dalam peningkatan mutu

pendidikan meliputi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan. Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya pada tingkat satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, cara komite sekolah dalam menjalankan fungsinya diatur dalam pasal 196 ayat (2). Adapun bunyi pasal 196 ayat (2), “komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional”.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Sebagai badan yang mandiri, komite sekolah/madrasah tidak mengesampingkan masukan, saran, kritik, maupun aspirasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat (3). Adapun bunyi pasal 196 ayat (3), “komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan”. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, komite sekolah/madrasah mendengarkan segala masukan masyarakat. Komite sekolah/madrasah juga menindaklanjuti segala aspirasi masyarakat terkait peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa Komite Sekolah memainkan peranan vital dalam upaya memajukan pendidikan. Komite Sekolah turut berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Hal ini menjadikan Komite Sekolah sebagai mitra strategis sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada kegiatan operasionalnya, Komite Sekolah memiliki peran yang saling terkait satu sama lain. Menurut Tatang M. Amirin (2011:29) menyatakan bahwa Komite Sekolah memiliki peran antara lain (1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) pendukung (*supporting agency*) baik berwujud finansial, pemikiran

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan bahwa ada empat fungsi dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu memberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan penghubung (*mediating agency*).

Peran Komite Sekolah sebagaimana di jelaskan di atas, dijabarkan lagi menjadi fungsi Komite Sekolah. Artinya, satu peran Komite Sekolah terkait dengan fungsi Komite Sekolah. Adapun fungsi Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan meliputi 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) RAPBS; 3) kriteria tenaga kependidikan; 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
2. Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
6. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (Sri Renani Pantjastuti, 2008: 83).

Menurut Syaiful Sagala (2009:257), Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai pemberi pertimbangan antara lain (1) memberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten/kota dan RKS serta RKT tingkat satuan pendidikan; (2) memberikan pertimbangan kepada guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa (misalnya dalam hal memberi hukuman bagi siswa); (3) memberi pertimbangan dalam hal peningkatan disiplin guru dan memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru; (4) memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa (misalnya dalam keikutsertaan siswa dalam lomba-lomba).
2. Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pendukung antara lain (1) mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan, mendata tingkat pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan; (2) memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan; (3) mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan Komite Sekolah; (4) mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar, dan remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang dipersyaratkan; (5) menyediakan hadiah dan trophy bagi siswa yang menjuarai perlombaan; (6) mengadakan kegiatan pesantren kilat; (7) mendukung pemanfaatan sarana-prasarana untuk mendukung pembelajaran; (8) membuat media pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa; (9) membuat kebun percontohan sekolah; (10) memaksimalkan alokasi anggaran operasional sekolah yang bersumber dari APBD, dan bantuan lain.
3. Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pengontrol antara lain (1) menanyakan proses belajar mengajar apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan; (2) menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik; (3) memantau

pelaksanaan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT); (4) ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT; (5) ikut memantau penggunaan dana BOS; (6) ikut dalam rapat pembagian rapor; (7) mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (8) mengontrol pelaksanaan proses belajar mengajar guru.

4. Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai mediator antara lain (1) menghubungkan dengan instansi pemerintah; (2) menghubungi orangtua siswa yang mampu untuk diminta menjadi donatur bagi kegiatan sekolah; (3) mencari informasi yang bisa dipakai untuk mengembangkan sekolah; (4) memberi laporan kepada masyarakat tentang kondisi keuangan dan penggunaan anggaran sekolah.

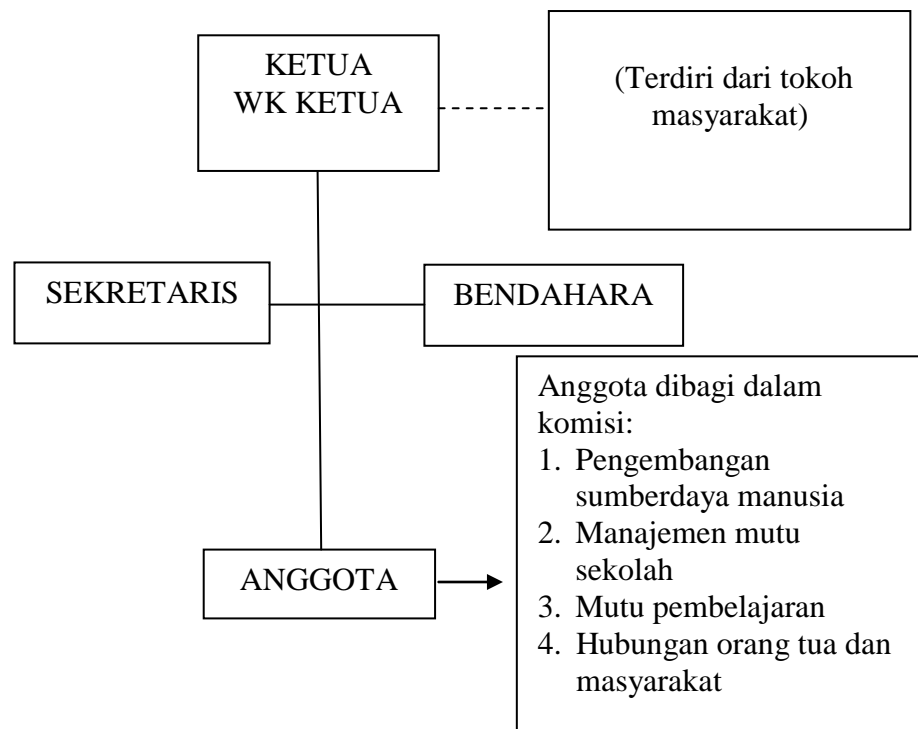
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator pada sebuah satuan pendidikan. Peran Komite Sekolah dijabarkan menjadi fungsi Komite Sekolah. Artinya, satu peran Komite Sekolah terkait dengan fungsi Komite Sekolah. Fungsi Komite Sekolah antara lain memberikan pertimbangan, mendorong orangtua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat untuk pembiayaan pendidikan, dan mengevaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan.

5. Kepengurusan Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat dan orangtua yang berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Sebagai sebuah organisasi, Komite Sekolah memiliki suatu kepengurusan. Kepengurusan pada Komite Sekolah harus mencerminkan sifat organisasi yang otonom dan mandiri. Oleh karena itu, proses pembentukan pengurus Komite Sekolah harus menganut

tiga prinsip, yaitu (1) demokratis, (2) transparansi, dan (3) akuntabel (Sri Renani Pantjastuti, 2008: 86).

Menurut Sri Renani Pantjastuti (2008: 95), kepengurusan Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu. Komposisi pengurus dan keanggotaan Komite Sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu satuan pendidikan. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah pengurus dan anggota Komite Sekolah harus berasal dari elemen-elemen masyarakat dan orangtua siswa. Berikut ini gambar yang menunjukkan bagan organisasi kepengurusan Komite Sekolah.



Gambar 1. Struktur Komite Sekolah (Syaiful Sagala, 2007: 240)

Guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi antara Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat, maka perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi. Selain itu, perlu pula diatur tentang kapan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan harus menjaga jarak. Besarnya peran orang tua dan masyarakat dalam Komite Sekolah dalam mengelola sekolah harus

sesuai dengan aturan yang berlaku. Komite Sekolah tidak boleh bertindak sewenang-wenang menurut selera orang-orang yang ada dalam badan tersebut (Syaiful Sagala, 2007: 240).

Komite Sekolah dijalankan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah diatur sedemikian rupa. Menurut Sri Renani Pantjastuti (2008: 97) mekanisme kerja Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

1. Pengurus Komite Sekolah yang terpilih bertanggung kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD/ART.
2. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja dengan fokus utama untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
3. Apabila dalam masa jabatannya pengurus Komite Sekolah dinilai tidak produktif, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan atau mengganti dengan kepengurusan baru.
4. Pembiayaan Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah anggota.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepengurusan Komite Sekolah dibentuk dengan mengedepankan prinsip demokratis, transparansi, dan akuntabel. Kepengurusan yang terbentuk sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bidang-bidang tertentu dengan komposisi yang disesuaikan kebutuhan Komite Sekolah di suatu satuan pendidikan. Artinya, kepengurusan Komite Sekolah pada suatu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lainnya tidak selalu sama. Kepengurusan dan keanggotaan dalam Komite Sekolah berasal dari orangtua dan elemen-elemen masyarakat.

B. Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Sekolah menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan melalui kegiatan pembelajaran. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagaimana besar dilakukan di kelas, dengan guru dan siswa sebagai subyek pembelajaran.

Pembelajaran tidak sekadar berfokus pada pemberian pengetahuan dari buku atau dari guru kepada siswa. Lebih dari itu, pembelajaran harus mampu membelajarkan siswa agar dapat mengolah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki. Dimiyati (2013: 157) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pembelajaran mengutamakan pada pengembangan segala potensi yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, guru harus memosisikan diri sebagai fasilitator, yang memfasilitasi siswa untuk pengembangan potensinya. Wina Sanjaya (2010:26) menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi (Rusman, 2013:1). Guru harus mampu mengelola keempat komponen dengan baik, agar pembelajaran dapat berjalan secara sistematis. Dengan demikian siswa akan mampu mengembangkan segala potensinya secara maksimal.

Istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa

(Hamzah B. Uno, 2006: 2). Hakikat pembelajaran sebagai perencanaan memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sesuatu yang direncanakan. Hal ini senada dengan pengertian pembelajaran sebagai sebuah sistem, karena suatu sistem memerlukan sebuah perencanaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala sumber belajar, baik itu berupa buku, media belajar, maupun lingkungan sekitar yang ada guna mengembangkan potensi siswa yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan belajar tertentu. Selain itu, pembelajaran juga diartikan sebagai sebuah sistem yang dibentuk melalui suatu tahap perencanaan dan terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi.

2. Tujuan Pembelajaran

Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai berikut

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan seperti dalam rumusan di atas, disebut Tujuan Pendidikan Nasional dan merupakan tujuan pendidikan yang paling umum. Tujuan Pendidikan Nasional merupakan sesuatu paling ideal yang menjadi sasaran akhir dari proses pendidikan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan memiliki tujuan akhir sebagaimana termaktub pada ayat tersebut.

Menurut Wina Sanjaya (2010: 123-125), tujuan pendidikan memiliki sebuah hierarki, dimulai dari tujuan umum sampai tujuan

khusus yang spesifik dan dapat diukur. Adapun hierarki tujuan nasional adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan paling ideal yang menjadi sasaran akhir dari penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia, tujuan umum adalah Tujuan Pendidikan Nasional yang termaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Tujuan umum bersifat sangat umum dan ideal. Selain itu, tujuan umum juga sulit untuk diukur. Oleh karena itu, perlu tujuan pendidikan umum perlu dirumuskan lebih ke dalam tujuan yang lebih khusus.

b. Tujuan Institusional

Tujuan institusional adalah tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Tujuan institusional dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa yang mengikuti program pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Kedudukan tujuan institusional dalam hierarki tujuan pendidikan adalah sebagai tujuan antara untuk mencapai tujuan umum, yang dirumuskan dalam kompetensi lulusan. Tujuan institusional disesuaikan dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Artinya visi dan misi lembaga pendidikan tertentu dirumuskan sesuai dengan tujuan institusional.

c. Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang dibebankan oleh setiap mata pelajaran. Dengan kata lain, tujuan kurikuler dapat diartikan sebagai kualifikasi yang harus dicapai siswa setelah mempelajari sebuah mata pelajaran. Kedudukan tujuan kurikuler dalam hierarki tujuan pendidikan adalah sebagai tujuan antara untuk mencapai tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, tujuan kurikuler harus dapat mendukung tercapainya tujuan institusional.

d. Tujuan Pembelajaran atau Tujuan Instruksional

Tujuan pembelajaran merupakan kualifikasi tertentu yang harus dicapai siswa setelah mempelajari suatu bahasan atau topik tertentu dari sebuah mata pelajaran. Tujuan pembelajaran tidak sekadar berbentuk kecerdasan yang bersifat pengetahuan semata, namun juga dapat berupa perilaku. Menurut Mager (dalam Wina Sanjaya, 2010: 125) tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum adalah perilaku yang belum bersifat operasional, sehingga tidak dapat diobservasi seketika setelah pembelajaran selesai. Tujuan pembelajaran khusus adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi setelah pembelajaran berlangsung.

Menurut Bloom (dalam Hamzah B. Uno, 2006: 35-39), tujuan pembelajaran diarahkan pada tiga domain yang setiap domain memiliki hierarki berurut mulai dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Adapun ketiga domain tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Domain Kognitif

Domain kognitif merupakan domain yang berkaitan dengan proses mental atau kemampuan berpikir seseorang. Domain kognitif terdiri dari enam tingkatan yang mencerminkan tingkat kemampuan berpikir seseorang. Adapun tingkatan dalam domain kognitif meliputi (1) pengetahuan; (2) pemahaman; (3) penerapan; (4) analisis; (5) sintesis; (6) evaluasi.

Tujuan pembelajaran domain kognitif bersifat hierarkis. Artinya, setiap tujuan yang ada pada tingkatan paling rendah menjadi prasyarat untuk tujuan tingkatan berikutnya. Oleh karena itu, tujuan yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan menjadi tingkatan yang paling rendah, sedangkan evaluasi menjadi tingkatan domain kognitif yang paling tinggi.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, domain kognitif mengalami revisi. Anderson (dalam Wina Sanjaya, 2010: 128-129) menyatakan bahwa revisi yang dilakukan adalah dengan menambahkan tingkatan mencipta yang menggantikan posisi evaluasi dalam tingkatan domain kognitif tertinggi dan menghilangkan sintesis. Selain itu, semua tingkatan yang awalnya berupa kata benda diubah menjadi kata kerja, seperti pengetahuan yang diubah menjadi mengingat. Adapun hierarki tingkatan domain kognitif meliputi (1) mengingat; (2) memahami; (3) menerapkan; (4) menganalisis; (5) mengevaluasi; (6) mencipta.

b. Domain Afektif

Domain afektif berkaitan dengan aspek sikap, minat, apresiasi, dan penyesuaian sosial. Domain afektif merupakan domain tujuan pembelajaran kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, siswa akan mampu memiliki dan meyakini suatu sikap tertentu terhadap suatu objek setelah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terdapat lima tingkatan dalam domain afektif. Adapun tingkatan pada domain afektif meliputi (1) kemauan menerima; (2) kemauan menanggapi; (3) berkeyakinan; (4) penerapan karya; (5) ketekunan dan ketelitian.

c. Domain Psikomotor

Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan siswa. Dengan kata lain, domain psikomotor berkaitan dengan semua tingkah laku yang menggunakan syaraf, otot, dan badan. Pada umumnya domain psikomotor berhubungan dengan mata pelajaran yang memerlukan kemampuan gerak tubuh, seperti seni dan olah raga. Sebagaimana kedua domain yang telah dibahas sebelumnya, domain psikomotor memiliki tingkatan yang meliputi (1) persepsi; (2) kesiapan melakukan suatu kegiatan; (3) mekanisme; (4) respons terbimbing; (5) kemahiran; (6) adaptasi; (7) originasi.

Tiga domain tujuan pembelajaran merupakan satu suatu kesatuan yang saling terkait. Hal ini dapat dipahami dengan mengibaratkan domain kognitif sebagai kepala, karena berhubungan dengan intelektualitas. Domain afektif diibaratkan sebagai hati, karena berhubungan dengan sikap dan nilai. Terakhir, domain psikomotor diibaratkan sebagai tubuh yang bergerak, dan bertindak sesuai dengan perintah dari kepala (kognitif) yang telah melalui pertimbangan dari hati (afektif).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran adalah kualifikasi tertentu yang harus dicapai siswa setelah mempelajari suatu bahasan atau topik tertentu dari sebuah mata pelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada tujuan kurikuler suatu mata pelajaran, tujuan institusional suatu lembaga pendidikan, dan Tujuan Pendidikan Nasional yang merupakan tujuan umum yang paling ideal dan menjadi sasaran akhir pendidikan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran memiliki domain yang meliputi domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor.

3. Komponen Pembelajaran

Pembelajaran dapat diartikan sebagai sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain. Rusman (2013: 1) menyatakan bahwa komponen pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Keempat komponen tersebut harus diperhatikan oleh guru saat menentukan model pembelajaran yang akan digunakan.

Menurut Brown (dalam Wina Sanjaya, 2010: 9-13), komponen pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Siswa

Siswa merupakan subyek dalam pembelajaran. Dengan demikian, segala kegiatan pembelajaran harus menjadikan siswa sebagai

pusatnya. Pembelajaran harus direncanakan dengan menyesuaikan kondisi siswa, seperti kemampuan dasar, minat, bakat, motivasi, dan gaya belajar siswa. Jadi, keputusan apapun yang terkait dengan pembelajaran harus berangkat dari kondisi siswa yang akan dibelajarkan.

b. Tujuan

Tujuan merupakan komponen yang penting setelah siswa. Tujuan pembelajaran merupakan turunan dari visi misi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya tujuan, maka pembelajaran akan lebih terarah. Artinya tujuan pembelajaran yang dirumuskan berorientasi pada tujuan umum lembaga pendidikan. Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai teknik untuk mencapai tujuan pendidikan.

c. Kondisi

Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah dirumuskan. Pengalaman belajar harus malah mampu membuat siswa belajar secara aktif. Oleh karena itu, pada proses merancang suatu pembelajaran guru harus mampu menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar dengan penuh motivasi. Pada proses pembelajaran guru juga harus berperan sebagai fasilitator yang mampu memfasilitasi siswa agar dapat belajar sesuai minat, motivasi, dan gaya belajarnya sendiri. Dengan demikian pembelajaran dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Hal ini dikarenakan penekanan pada proses penciptaan kondisi belajar adalah siswa secara individu.

d. Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar. Sumber belajar meliputi lingkungan fisik, seperti tempat belajar, buku, perpustakaan, dan guru. Pada proses pembelajaran, guru harus mampu menentukan

sumber belajar yang akan digunakan. Selain itu, guru juga harus menentukan apa yang harus dilakukan guru dan siswa dalam memanfaatkan sumber belajar tersebut. Hal tersebut dilakukan guna mendukung penciptaan pengalaman belajar yang baik agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

e. Hasil belajar

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan atau kompetensi. Hasil belajar juga menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian tugas guru adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Data yang telah terkumpul digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan program pembelajaran.

Wina Sanjaya (2014: 58-61) menyatakan bahwa komponen pembelajaran yang saling terkait dalam suatu sistem pembelajaran meliputi tujuan, isi atau materi, metode, media, dan evaluasi. Seluruh komponen pembelajaran tersebut menunjang keberhasilan proses pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran sebagai sebuah sistem memiliki komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen-komponen tersebut meliputi siswa, tujuan, kondisi, materi dan sumber belajar, hasil belajar, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seluruh komponen tersebut saling terkait dan menunjang keberhasilan suatu pembelajaran.

4. Perencanaan Pembelajaran

Pembelajaran memiliki peran vital dalam usaha mencapai Tujuan Pendidikan Nasional. Hal tersebut membuat pembelajaran perlu direncanakan dengan baik dan matang. Menurut Wina Sanjaya (2010:

28), perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada.

Perencanaan perlu dilakukan guna memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Wina Sanjaya (2010: 31-32), terdapat beberapa alasan mengapa pembelajaran perlu direncanakan, yaitu (1) pembelajaran merupakan proses yang bertujuan; (2) pembelajaran adalah proses kerjasama yang melibatkan banyak pihak (minimal guru dan siswa); (3) pembelajaran adalah proses yang kompleks; (4) proses pembelajaran akan efektif bila memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia sebagai sumber belajar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembelajaran merupakan proses yang kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perencanaan yang selanjutnya dijadikan pedoman pembelajaran yang diwujudkan dalam sebuah dokumen.

Perencanaan pembelajaran sebagai pedoman pembelajaran bukan sekadar dokumen administrasi semata. Perencanaan pembelajaran harus disusun sebagai bagian dari profesional guru, sehingga didapatkan sebuah dokumen yang menjadi pedoman pembelajaran yang berkualitas. Dalam proses membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang berkualitas, dibutuhkan kriteria tertentu yang dijadikan acuan. Wina Sanjaya (2010: 38-40) menyatakan bahwa kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Signifikansi

Signifikansi diartikan sebagai kebermaknaan. Kebermaknaan memiliki makna bahwa perencanaan pembelajaran tidak disusun secara asal dan bukan sekadar pelengkap administrasi semata.

Perencanaan pembelajaran harus memiliki makna agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

b. Relevan

Relevan artinya sesuai. Kriteria relevan memiliki makna bahwa perencanaan harus memiliki relevansi atau kesesuaian dengan kurikulum. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan sumber perencanaan pembelajaran. Kurikulum memberikan pedoman tentang tujuan yang harus dicapai, materi yang harus dipelajari siswa, dan lain sebagainya. Selain itu, perencanaan pembelajaran juga harus relevan dengan kebutuhan siswa. Hal ini karena siswa merupakan subyek pembelajaran yang menjadi pusat pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sebisa mungkin harus memperhatikan minat siswa, kemampuan dasar siswa, dan gaya belajar siswa.

c. Kepastian

Kepastian bermakna bahwa suatu perencanaan pembelajaran merupakan pedoman yang memuat langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Dengan adanya kepastian, maka guru akan mampu menepis keraguan dalam menentukan alternatif langkah-langkah yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kriteria kepastian juga menumbuhkan keyakinan kepada guru bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.

d. Adaptabilitas

Perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel atas segala kemungkinan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Artinya, pembelajaran yang dirancang tidak memerlukan persyaratan tertentu, manakala syarat tersebut gagal terpenuhi maka pembelajaran menjadi tidak dapat dijalankan secara maksimal. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran sebaiknya disusun

sedemikian rupa agar mampu dilaksanakan dalam berbagai situasi dan kondisi.

e. Kesederhanaan

Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, tidak rumit, dan tidak memuat hal-hal yang bersifat ambigu. Hal ini dikarenakan perencanaan pembelajaran yang rumit akan menyulitkan guru dalam menerjemahkan perencanaan tersebut pada proses pembelajaran. Dengan demikian, guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

f. Prediktif

Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi pada proses pembelajaran. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran harus memiliki daya ramal atau memiliki sifat prediktif atas apa yang akan terjadi pada proses pembelajaran. Dengan daya prediktif tersebut penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan menghambat proses pembelajaran.

Rusman (2013: 4-7) menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Silabus

Silabus merupakan acuan pengembangan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Silabus memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Muatan pada silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah dokumen yang menjadi pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang

disusun sesuai silabus. Setiap guru wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri dari serangkaian komponen yang meliputi (1) identitas mata pelajaran; (2) standar kompetensi; (3) kompetensi dasar; (4) indikator pencapaian kompetensi; (5) tujuan pembelajaran; (6) materi ajar; (7) alokasi waktu; (8) metode pembelajaran; (9) kegiatan pembelajaran; (10) penilaian; (11) sumber belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Pada proses perencanaan pembelajaran guru harus mengindahkan kriteria signifikansi, relevansi, kepastian, adaptabilitas, kesederhanaan, dan prediktif. Perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam dokumen yang meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pembelajaran

Pembelajaran membutuhkan perencanaan guna menentukan segala kebutuhan pembelajaran seperti media dan bahan ajar, penentuan model dan strategi pembelajaran dan langkah-langkah operasional pembelajaran. Perencanaan tersebut menjadi pedoman praktis guru dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi perencanaan belum mampu menjadi jaminan atas mutu suatu pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mutu suatu pembelajaran. Wina Sanjaya (2014: 52-57) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Faktor Guru

Guru merupakan ujung tombak yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru yang menyusun

perencanaan pembelajaran. Selain dituntut untuk mampu membuat perencanaan pembelajaran yang baik, guru juga harus mampu melaksanakan perencanaan tersebut. Apabila guru gagal dalam menerjemahkan perencanaan tersebut, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kepiawaian dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran.

Guru juga harus memahami bahwa profesi guru menuntut kesungguhan guru sebagai pendidik. Artinya, guru bukan sekadar pekerjaan menyampaikan materi semata. Guru harus sadar bahwa sebagai pendidik profesional, pekerjaan yang paling utama adalah membimbing siswa agar mampu belajar secara aktif sesuai dengan minat, kemampuannya, dan gaya belajarnya sendiri. Hal ini agar siswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dalam suatu pembelajaran dengan baik.

Dalam proses pembelajaran, guru yang profesional juga harus mampu berperan sebagai pengelola kelas yang baik. Pengelolaan kelas dibutuhkan agar dapat diciptakan suatu kondisi pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Sebagai pengelola pembelajaran, guru harus menjadi sosok yang kharismatik agar siswa segan. Hal tersebut diperlukan terutama manakala siswa gaduh, terjadi perkelahian dan kondisi lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran mutu dapat terlaksana apabila guru mampu menerjemahkan perencanaan yang telah dibuat dengan baik, dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang profesional dengan menjadi pembimbing siswa dalam belajar. Selain itu guru juga harus mampu mengelola kelas agar tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif.

b. Faktor Siswa

Siswa merupakan individu yang unik. Keunikan tersebut dikarenakan setiap siswa di dalam suatu kelas memiliki minat, kemampuan dasar, latar belakang, motivasi, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Keunikan tersebut mempengaruhi proses pembelajaran. Selain itu, sikap siswa juga mempengaruhi proses pembelajaran. Terdapat siswa yang sangat aktif, aktif, cukup aktif, dan siswa dengan motivasi belajar yang rendah. Perbedaan—perbedaan tersebut mempengaruhi pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran oleh siswa secara individu berbeda. Perbedaan tersebut menuntut adanya perlakuan yang bebrbeda dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan faktor siswa mempengaruhi pola interaksi dengan guru dalam pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor perbedaan individu yang dimiliki siswa, baik latarbelakang, minat, kemampuan dasar, gaya belajar, dan sikap mempengaruhi proses pembelajaran. Perbedaan-perbedaan tersbut berpengaruh dengan pencapaian kompetensi pembelajaran oleh siswa secara individu. Diperlukan perlakuan yang berbeda dalam mengelola segala perbedaan individu siswa. Hal ini karena faktor siswa dapat mempengaruhi interkasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dimaknai sebagai segala hal yang mendukung secara langsung kelancaran pembelajaran. Sarana dapat berupa media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan perlengkapan sekolah; sedangkan prasarana dimaknai sebagai segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang kelancaran pembelajaran. Adapun prasarana dapat berupa jalan raya menuju sekolah, penerangan sekolah, dan kamar mandi sekolah.

Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya, ketika guru

menyampaikan materi dapat dipermudah dengan menggunakan media pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai juga membawa manfaat bagi sekolah yaitu 1) kelengkapan sarana dan prasarana akan menambah gairah dan motivasi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran; 2) kelengkapan sarana dan prasarana juga membuat siswa memiliki banyak pilihan dalam belajar, misalnya siswa dengan gaya belajar bertipe visual dapat belajar dengan media berupa gambar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sarana adalah segala hal yang mendukung secara langsung kelancaran pembelajaran, seperti media pembelajaran dan alat tulis; sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang kelancaran pembelajaran, seperti kamar mandi sekolah dan penerangan sekolah. Kelengkapan sarana dan prasarana memberikan pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana memiliki manfaat yaitu (1) menambah gairah dan motivasi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran; (2) memberikan banyak pilihan kepada siswa dalam belajar, seperti siswa dengan gaya belajar bertipe visual dapat belajar dengan media berupa gambar.

d. Faktor Lingkungan

Dilihat dari dimensi lingkungan terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi mutu pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) faktor lingkungan organisasi kelas

Faktor organisasi kelas meliputi jumlah siswa dalam suatu kelas. Jumlah siswa merupakan aspek penting yang bisa memengaruhi proses pembelajaran. Jumlah siswa yang terlalu besar dalam suatu kelas akan membuat proses pembelajaran berjalan kurang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang

terlampau besar memiliki kecenderungan (a) sumber daya kelompok belajar akan bertambah, sehingga waktu yang tersedia akan semakin sempit; (b) kelompok belajar akan kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada proses pembelajaran; (c) kelompok belajar yang terlalu besar menyebabkan kepuasan siswa dalam pembelajaran berkurang; (d) perbedaan individu akan tampak semakin besar, sehingga akan sukar untuk diakomodasi guru; (e) kemajuan pencapaian tujuan pembelajaran akan melambat, seiring banyaknya perbedaan antarsiswa; (f) banyaknya siswa akan berdampak pada antusiasme dan tingkat keaktifan siswa yang menurun.

Melihat kecenderungan-kecenderungan tersebut, maka jumlah siswa yang banyak dalam suatu kelas kurang menguntungkan dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Jumlah siswa dalam kelas perlu disesuaikan dengan kemampuan guru dan sumber daya yang ada. Hal ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor organisasi kelas memiliki dampak terhadap pembelajaran. Jumlah organisasi kelas yang besar berkecenderungan pada efektifitas waktu pembelajaran, pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal, kepuasan belajar siswa yang menurun, ketidakmampuan guru dalam mengakomodasi perbedaan siswa, kelambatan kemajuan pencapaian tujuan pembelajaran, dan penurunan antusiasme dan tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu jumlah siswa harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Hal tersebut agar tercipta suatu kondisi pembelajaran yang kondusif dan pembelajaran berjalan dengan efektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2) Faktor iklim sosial-psikologis

Faktor iklim sosial-psikologis diartikan sebagai keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial-psikologis dibagi dapat terjadi secara internal atau eksternal. Secara internal, iklim sosial-psikologis adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, seperti siswa dengan siswa, dan guru dengan siswa. Hubungan yang baik antara internal sekolah berpengaruh pada kelancaran pembelajaran. Misalnya, hubungan antara guru dengan siswa yang baik, dapat mempengaruhi pola interaksi yang baik pula dalam pembelajaran. Hal ini berdampak pada kemudahan guru dalam membelajarkan materi pembelajaran kepada siswa, dan kemudahan siswa dalam menerima dan mengolah materi yang didapat dari guru.

Iklim sosial-psikologis secara eksternal diartikan sebagai hubungan antara sekolah dengan pihak-pihak luar, seperti masyarakat dan orang tua. Hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan pihak luar akan menambah kelancaran program-program sekolah, sehingga upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran akan mendapat dukungan dari pihak luar tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor iklim sosial-psikologis memiliki dampak terhadap proses pembelajaran. Iklim sosial-psikologis dapat terjadi secara internal atau eksternal. Secara internal, iklim sosial-psikologis adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, seperti siswa dengan siswa, dan guru dengan siswa. Iklim sosial-psikologis secara eksternal adalah keharmonisan antara pihak sekolah dengan pihak-pihak luar. Sekolah dengan hubungan yang baik secara internal akan berpengaruh pada

kelancaran pembelajaran. Misalnya, hubungan antara guru dengan siswa yang baik, dapat mempengaruhi pola interaksi yang baik pula dalam pembelajaran. Hubungan pihak sekolah dengan pihak luar yang baik berdampak pada kelancaran program-program sekolah oleh pihak luar, seperti orangtua dan masyarakat. Selain itu, upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran akan mendapat dukungan penuh orangtua dan masyarakat.

C. Penelitian Relevan

Kiki Sukinawan dalam penelitiannya tentang peran Komite Sekolah dalam proses manajemen sekolah di SD Negeri Serayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komite Sekolah memiliki peran dalam proses pembangunan fasilitas sekolah dengan cara menggalang dana dari orang tua siswa, alumni, dan sponsorship; (2) Komite Sekolah memiliki peran dalam manajemen kurikulum dengan cara mendukung penuh kurikulum yang digunakan dan memberikan masukan, serta melakukan kontrol terkait sejauh mana kurikulum berjalan; (3) Komite Sekolah memiliki peran dalam manajemen kesiswaan dengan cara mendukung dan memenuhi kebutuhan siswa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler; (4) Komite Sekolah memiliki peran dalam manajemen keuangan dengan cara memberikan pertimbangan dalam penyusunan RAPBS serta melakukan kontrol dana pendidikan mengingat sebagian dana berasal dari orangtua siswa; (5) Komite Sekolah memiliki peran dalam manajemen personalia dengan cara mendukung guru untuk selalu mengikuti pembekalan-pembekalan untuk mengembangkan wawasannya; (6) Komite Sekolah memiliki peran dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dengan cara meningkatkan komunikasi yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat dan lembaga bimbingan terdekat; (7) Peran Komite Sekolah dalam manajemen sekolah tentu tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi (Kiki Sukinawan, 2014: 40-49).

Wahyu Adhi Nugroho dalam penelitiannya tentang peran komite sekolah dalam pemberdayaan sekolah di SD Negeri Gunungpring 02. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite sekolah telah melaksanakan perannya dalam rangka pemberdayaan sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator dalam pemberdayaan sekolah di SD Negeri Gunungpring 02. Akan tetapi, masih terdapat dua peran Komite Sekolah yang berkaitan dengan pemberdayaan sekolah yang sejauh ini belum terlaksana, yakni memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang diperbantukan di sekolah dan sebagai penghubung antara sekolah dengan dewan pendidikan (Wahyu Adhi Nugroho, 2013: 43-48).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian evaluasi (*evaluative research*) yang bertujuan untuk mengevaluasi peran Komite Sekolah di Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk membuat rekomendasi dalam mendukung kebijakan atau keputusan tentang peran Komite Sekolah di Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul.

Pendekatan evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi model Stake (*Stake's Countenance Model*) yang mengukur keterlaksanaan proses peran Komite Sekolah yang terjadi di lapangan dengan standar peran Komite Sekolah yang seharusnya sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Desain evaluasi model *Stake's Countenance Model* menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok yakni deskripsi (*description*) dan pertimbangan keputusan (*judgements*). Dua hal pokok ini dibedakan dalam tiga tahap evaluasi program yaitu: 1) input dan perencanaan (*antecedent*), 2) proses (*transaction*), 3) hasil (*outcomes*). Model evaluasi Stake merupakan metode yang sistematis untuk mengevaluasi keterlaksanaan proses peran Komite Sekolah secara menyeluruh yang meliputi rencana, pelaksanaan, dan pelaksanaan penilaian hasil.

Model evaluasi Stake dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian evaluasi yang hendak dilaksanakan dan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan implementasi peran Komite Sekolah SD di Kabupaten Bantul. Desain evaluasi penelitian yang menggunakan evaluasi model Stake, memiliki beberapa tahapan yaitu:

a. Fase Input dan Perencanaan (*Antecedent Phase*)

Antecedent Phase atau fase pendahuluan mendeskripsikan pemahaman guru terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah, yang terdiri dari: konsep Komite Sekolah, fungsi dan tujuan, dan manfaat.

b. Fase Pelaksanaan (*Transaction Phase*)

Transaction Phase atau tahap pelaksanaan mendeskripsikan pelaksanaan/implementasi peran Komite Sekolah di Bantul. Implementasi program Komite Sekolah meliputi: pelaksanaan administrasi dan organisasi atau tata pamong, pelaksanaan manajemen atau tata kelola, dan pelaksanaan proses implementasi peran Komite Sekolah.

c. Tahap Hasil Program (*Output Phase*)

Output Phase atau tahap hasil program mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi implementasi peran Komite Sekolah SD di Kabupaten Bantul yang diperoleh dari data angket, observasi, dan dokumentasi.

Selanjutnya peneliti membuat suatu pertimbangan keputusan (*judgement*) terkait dengan pemahaman civitas sekolah terhadap implementasi peran Komite Sekolah SD di Kabupaten Bantul. Keputusan peneliti berdasarkan pada dua hal yaitu: (1) standar ideal (*absolute standard*) yaitu menjelaskan pada proses yang telah terealisasi dan (2) standar relatif (*relative standard*) yaitu mendasarkan pada suatu standar atau kriteria yang sesuai dengan program MBS. Peneliti akan menghubungkan kaitannya dengan kesesuaian (*congruence*) antara yang diharapkan (*intended*) oleh program MBS dengan yang diamati (*observed*).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bantul. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015. Adapun jadwal kegiatan penelitian terdiri dari persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan data, analisis data, dan penyusunan laporan.

Adapun jadwal kegiatan penelitian terdiri dari persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan data, analisis data, penyusunan laporan, dan pelaporan sebagai berikut,

Tabel 2. Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept |
|-----|---|-------|-----|------|------|-------|------|
| 1. | Persiapan Penelitian | | | | | | |
| 2. | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | |
| 3. | Analisis Data dan Penyusunan Laporan | | | | | | |
| 4. | Pelaporan | | | | | | |

3. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh SDN di Kabupaten Bantul.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi sehingga sampel yang diambil harus benar-benar representative untuk dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2012: 81). Untuk mendapatkan sampel tersebut diperlukan suatu teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel.

Teknik sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling Technique*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012: 82). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul sehingga sumber datanya sangat banyak, oleh karena itu digunakan sampling area (*Cluster Sampling*).

Jika dirumuskan, terdapat dua tahap yang harus dilakukan dalam sampling area. Pertama, menentukan sampel daerah, yaitu berapa kecamatan yang akan dipilih. Kedua, menentukan orang-orang di kecamatan tersebut sebagai sampel.

a. Tahap I: Menentukan sampel daerah

Dilakukan dengan *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan jika karakteristik anggota populasinya tidak sama. Teknik ini digunakan karena karakteristik (jumlah sekolah dan guru) setiap kabupaten berbeda, sehingga diambil sampel kabupaten dengan jumlah SD/guru sedikit-sedang-banyak. Dalam penelitian, seluruh kecamatan menjadi sampel daerah.

Penarikan ukuran sampel SD berpedoman pada table penentuan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Isaac & Michael dengan taraf kesalahan 10% (Sugiyono, 2012: 87). Jumlah populasi SD di Kabupaten Bantul terpilih sebanyak 148 SD, jika dikonsultasikan pada table, maka jumlah sampel berjumlah 95 SD. Langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel yang proporsional sesuai dengan jumlah populasi di setiap daerah k/elurahan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Sampel daerah} = \frac{\text{populasi daerah}}{\text{populasi}} \times \text{sampel total}$$

Perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

$$\text{Kecamatan Wates} = \frac{32}{148} \times 95 = 20,54$$

$$\text{Kecamatan Lendah} = \frac{24}{148} \times 95 = 15,4$$

$$\text{Kecamatan Pengasih} = \frac{32}{148} \times 95 = 20,54$$

$$\text{Kecamatan Temon} = \frac{20}{148} \times 95 = 12,8$$

$$\text{Kecamatan Kalibawang} = \frac{15}{148} \times 95 = 8,98$$

$$\text{Kecamatan Samigaluh} = \frac{25}{148} \times 95 = 16$$

Hasil tersebut kemudian dibulatkan hingga diperoleh jumlah sampel untuk masing-masing daerah, sehingga diperoleh jumlah sample sebanyak 108.

b. Tahap II: Menentukan subyek/ orang sebagai sampel di tiap daerah.

Penentuan subyek/orang sebagai sampel di tiap daerah dilakukan dengan acak atau random sehingga semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Cara ini dilakukan dengan mengundi nama

sekolah yang terdapat pada masing-masing kecamatan, jumlah yang diambil disesuaikan dengan ukuran sampel kabupaten yang telah ditentukan.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai pendukung informasi dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan selain melalui angket juga melalui obsevasi dan dokumentasi. Tujuan penggunaan metode tersebut adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki validitas serta reliabilitas instrument yang tinggi.

a. Angket

Teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan program MBS melalui daftar pertanyaan (angket). Teknik angket pada penelitian ini disampaikan kepada Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Guru SD di Kabupaten Bantul untuk mengukur: (1) pemahaman tentang rancangan pelaksanaan peran Komite Sekolah. (2) pemahaman tentang konsep-konsep dalam sistematika pelaksanaan peran Komite Sekolah. (3) pemahaman mengenai konsep pelaksanaan evaluasi/penilaian tentang implementasi peran Komite Sekolah.

Lembaran angket yang digunakan mengandung sejumlah pernyataan atau pertanyaan yang berisi informasi tentang hal-hal yang diketahui oleh responden. Pengambilan data bersifat langsung, tertutup dan bertingkat. Langsung artinya angket dierikan langsung kepada responden sehingga responden tinggal menjawab apa yang ditanyakan tentang dirinya. Tertutup artinya angket telah disediakan jawabannya, responden tinggal memilih jawaban yang tersedia. Bertingkat artinya setiap pertanyaan atau pernyataan dalam angket berisi 4 alternatif jawaban yang dimulai dari kondidi terendah sampai kondisi tertinggi. Pengumpulan data variable diisi oleh guru SD dengan menggunakan 4 skala likert melalui empat alternative jawaban, yaitu:

Sl : Selalu, jika pernyataan dalam angket sesuai kondisi atau situasi di lapangan dan dilakukan secara rutin, skornya = 4

- Sr : Sering, jika pernyataan dalam angket sesuai kondisi atau situasi lapangan dan kadang-kadang dilakukan, skornya = 3
Jr : Jarang, jika pernyataan dalam angket pernah dilakukan di lapangan tetapi jarang sekali, skornya = 2
TP : Tidak Pernah, jika pernyataan dalam angket tidak pernah dilakukan, skornya = 1

b. Observasi.

Observasi digunakan untuk *cross check* terhadap data yang dikumpulkan mengenai proses implementasi peran Komite Sekolah SD di Kabupaten Bantul. Observasi dilakukan pada komite sekolah. Lembaran observasi yang digunakan mengandung sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan implementasi peran Komite Sekolah. Pedoman observasi untuk pengambilan data dilengkapi dengan 4 kriteria pilihan jawaban dan diisi oleh observer dalam hal ini adalah peneliti. Skala penilaian untuk lembar observasi ini mengikuti pedoman observasi dengan nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Alat pengumpul data tersebut disampaikan langsung oleh peneliti kepada responden, dengan tujuan agar tepat sasaran dan data dapat terkumpul secara tepat.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berupa: dokumen komite sekolah, seperti dokumen tata pamong, dokumen komite sekolah, dll. Data yang terkumpul melalui angket, selanjutnya di *cross check* dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Lembaran dokumentasi yang digunakan mengandung uraian mengenai dokumen program pelaksanaan peran Komite Sekolah. Sama halnya dengan lembar observasi, pada lembar dokumentasi ini juga memiliki 4 skala penilaian dengan nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1 berdasarkan pada pedoman penilaian dokumentasi yang dibuat.

Tabel 2. Tehnik Pengumpulan Data

| Data yang Dikumpulkan | Metode Pengumpulan Data | Instrumen yang Digunakan | Sumber Informasi | Teknik Validasi | Reliabilitas |
|---|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| Antecedents (persiapan): Peran Komite Sekolah. | Angket | lembar angket | Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru | validator isi dan validator konstruk | Alpha Cronbach |
| | Dokumentasi | lembar dokumentasi | Kepala sekolah, Komite sekolah Guru | validator isi | Alpha Cronbach |
| Transaction (pelaksanaan): Sistematika Peran Komite Sekolah. | Angket | lembar angket | Kepala sekolah, Komite sekolah Guru | validator isi dan validator konstruk | Alpha Cronbach |
| | Observasi | lembar observasi | Kepala sekolah, Komite sekolah Guru | Validator isi | Alpha Cronbach |
| | Dokumentasi | lembaran dokumentasi | Kepala sekolah, Guru | validator isi | Alpha Cronbach |
| Outcomes (penilaian): Proses evaluasi/penilaian keterlaksanaan Peran Komite Sekolah | Angket | lembar angket | Kepala sekolah, Komite sekolah Guru | validator isi dan validator konstruk | Alpha Cronbach |
| | Observasi | lembar observasi | Kepala sekolah, Komite sekolah Guru, Siswa | validator isi | Alpha Cronbach |
| | Dokumentasi | lembar dokumentasi | Kepala sekolah, Komite sekolah Guru | validator isi | Alpha Cronbach |

2. Instrumen Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data, untuk memudahkan mendapatkan informasi disusunlah instrument penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrument. Berdasarkan pendekatan evaluasi Stake maka dilakukan pentahapan evaluasi. Pada masing-masing tahapan tersebut digunakan instrumen yang berbeda untuk mengukur ketiga variabel penelitian.

a. Instrumen variabel perencanaan peran Komite Sekolah

Untuk mengukur variabel perencanaan peran Komite sekolah yang dibuat oleh sekolah digunakan daftar pertanyaan pada teknik angket dan dokumentasi sebagai alat evaluasi. Daftar pertanyaan/pernyataan pada teknik angket menggunakan 4 alternatif jawaban. Semua aspek alternatif jawaban menggunakan skala likert, berupa pernyataan Sl (selalu), Sr (sering), Jr (jarang), TP (tidak pernah). Penskoran adalah Sl=4, Sr=3, Jr=2, TP= 1.

Tabel 3. Indikator Instrumen perencanaan pada teknik angket

| Aspek | Sub Aspek yang diukur | Indikator | Nomor Butir pertanyaan |
|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| Antecedents (persiapan) | | | |
| | | | |
| | Dst | dst | dst |

Selanjutnya, pernyataan dengan teknik dokumentasi untuk mengungkap dokumen perencanaan peran Komite Sekolah. Skala penilaian untuk dokumentasi ini mengikuti pedoman yang dibuat peneliti seperti pada lampiran 4.

b. Instrumen variabel sistematika pelaksanaan peran Komite Sekolah

Pada tahapan ini akan mengungkap sistematika peran Komite Sekolah yang dilakukan oleh sekolah berupa sistematika/tahapan pelaksanaan sistematika peran Komite Sekolah. Instrumen yang digunakan pada tahapan ini adalah melalui observasi. Untuk mengukur variabel sistematika sistematika peran Komite Sekolah digunakan instrumen angket dan lembaran observasi sebagai alat evaluasi. Pertanyaan/pernyataan pada teknik angket alternatif jawaban dan pemberian skor sama dengan instrumen variabel program perencanaan.

Instrumen untuk menjaring data variabel sistematika peran Komite Sekolah dengan menggunakan angket meliputi tahapan kegiatan

awal/pendahuluan, tahapan kegiatan inti, dan tahapan kegiatan evaluasi. Aspek-aspek yang diukur dan indikator sebagaimana terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Indikator instrumen sistematika pelaksanaan peran Komite Sekolah pada teknik angket

| Aspek | Sub Aspek yang diukur | Indikator | Nomor Butir pertanyaan |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| Transaction (pelaksanaan) | | | |
| | | | |
| | Dst | dst | Dst |

Selanjutnya, pernyataan yang terdapat pada lembaran observasi untuk mengungkap tahapan sistematika peran Komite Sekolah yang dilakukan oleh sekolah.

- c. Instrumen variabel pelaksanaan evaluasi/penilaian keterlaksanaan implementasi peran Komite Sekolah.

Tahapan ini adalah untuk mengungkap proses pelaksanaan evaluasi/penilaian keterlaksanaan peran Komite Sekolah di sekolah yang telah dilaksanakan. Instrumen yang digunakan pada tahapan ini adalah melalui angket, observasi dan dokumentasi. Pertanyaan/pernyataan pada teknik angket alternatif jawaban dan pemberian skor sama dengan instrumen variabel program pembelajaran. Aspek aspek yang diukur pada pelaksanaan penilaian keterlaksanaan implementasi peran Komite Sekolah.

Tabel 5. Indikator instrumen pelaksanaan evaluasi/penilaian keterlaksanaan implementasi peran Komite Sekolah pada teknik angket

| Aspek | Sub Aspek yang diukur | Indikator | Nomor Butir pertanyaan |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| Outcomes | | | |

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| (penilaian) | | | |
| | dst | dst | dst |

Instrumen untuk menjangkau data variabel keterlaksanaan implementasi program MBS dengan menggunakan angket. Pernyataan yang terdapat pada lembar observasi untuk mengungkap keterlaksanaan implementasi program MBS menggunakan skala evaluasi/penilaian untuk observasi mengikuti pedoman evaluasi/penilaian. Sedangkan pernyataan pada lembar dokumentasi mengikuti pedoman evaluasi/penilaian keterlaksanaan implementasi peran Komite Sekolah.

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validasi Instrumen

a. Validasi instrumen angket

Validitas instrumen pada teknik angket dilakukan secara validasi logis dan empiris melalui validasi isi dan konstruk. Validasi logis yaitu mencakup validasi isi pernyataan/pertanyaan yang ditentukan atas dasar pertimbangan (*Judgment*) dari para ahli. Sementara validasi empiris melalui ujicoba untuk menghubungkan performansi sebuah tes terhadap kriteria penampilan tes lainnya. Semua pertanyaan/pernyataan disusun berdasarkan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diukur. Supaya instrumen memiliki validitas isi yang tinggi maka instrumen tersebut dikonsultasikan dengan ahli. Agar instrumen dikatakan valid dan reliabel, maka instrumen terlebih dahulu diujicobakan sebelum digunakan di lapangan.

Validitas konstruk berorientasi pada pemeriksaan butir instrumen guna menetapkan apakah butir-butir tersebut cocok untuk menaksirkan unsur-unsur konstruk variabel. Pengukuran validasi konstruk dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi bivariat dari Pearson melalui bantuan komputer program SPSS for window release 19. Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas instrumen kuesioner adalah

berdasarkan pendapat Stevens's (Field, 2000: 462), jika butir memiliki muatan faktor (*faktor loading*) kurang dari 0,40, maka butir tersebut digugurkan. Adapun langkah-langkah penyusunan validitas isi instrumen sebagai berikut: (1) menyusun kisi-kisi aspek penilaian disesuaikan dengan ruang lingkup variabel yang akan diukur, (2) kisi-kisi yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan dengan ahli dalam hal ini pembimbing tesis, (3) hasil konsultasi kemudian dikembangkan dalam butir-butir angket pada teknik angket, observasi dan dokumentasi, (4) setelah jadi dikonsultasikan lagi dengan ahlinya.

b. Validasi instrumen observasi

Validitas instrumen observasi menggunakan validasi logis yang dilakukan untuk validasi isi. Hal ini mengukur sejauhmana instrumen yang digunakan dalam penelitian telah mencerminkan keseluruhan aspek yang akan diukur. Validasi instrumen observasi akan dikonsultasikan dengan ahli.

c. Validasi instrumen dokumentasi

Validasi instrumen dokumentasi dilakukan untuk memvalidasi isi, yaitu dengan mengukur sejauhmana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah mencerminkan keseluruhan yang diukur. Validasi instrumen dokumentasi akan dikonsultasikan dengan ahli.

2. Reliabilitas

a. Reliabilitas instrumen angket

Butir-butir yang valid dianalisis untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitas angket ini merujuk pada rumus *alpha* dari Fernades (1984: 38) sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

Dimana:

- R = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma_i^2$ = jumlah varians butir
- σ^2 = varians total

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan keandalan instrument adalah indeks kehandalan instrument lebih besar dari 0,7. Menurut Feldt dan Breman dalam Djemari Mardapi (1999: 14) bahwa indeks kehandalan lebih besar dari 0,7 sudah dapat diterima. Perhitungan reliabilitas instrument angket dilakukan dengan menggunakan bantuan computer seri program SPSS versi 19.

b. Reliabilitas instrumen observasi

Perhitungan reliabilitas instrumen observasi akan dikonsultasikan dengan ahli.

c. Reliabilitas instrumen dokumentasi

Reliabilitas untuk instrument dokumentasi akan dikonsultasikan dengan ahli.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian evaluasi ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran realitas tentang keterlaksanaan peran Komite Sekolah di Kabupaten Bantul dengan menerapkan konsep teori yang telah dikembangkan terhadap hal-hal yang dievaluasi. Semua data yang yang dikumpulkan baik angket, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis presentase kemudian dideskripsikan dan diambil kesimpulan tentang masing-masing komponen atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Besarnya presentase pada tiap kategori menunjukkan informasi yang diungkapkan secara langsung dan dapat diketahui posisi masing-masing aspek dalam keseluruhan maupun bagian-bagian permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif yang menghasilkan data angka (numerik). Tabulasi data untuk masing variable dilakukan terhadap skor yang telah diperoleh. Selanjutnya dianalisis dengan bantuan computer program SPSS versi 19 sebagai alat perhitungan akan diperoleh harga mean,

modus, rentang, nilai maksimum, nilai minimum, distribusi frekuensi dan histogram untuk setiap variabel penelitian.

1. Daftar distribusi frekuensi dan persentase

Daftar distribusi frekuensi menunjukkan rincian skor dari suatu perangkat data beserta frekuensinya masing-masing dalam suatu pengukuran. Daftar distribusi frekuensi menggambarkan seberapa sering masing-masing skor pada perangkat data itu muncul (Furqon, 2008: 22). Dalam penelitian evaluasi ini, skor yang dimaksud adalah penilaian (1 – 4, dalam skala Likert) yang diberikan oleh masing-masing kelompok responden terhadap indikator-indikator yang dievaluasi. Sedangkan persentase menunjukkan berapa persen responden dalam suatu kelompok memberikan suatu penilaian terhadap indikator tersebut.

2. Mean

Untuk mengetahui rata-rata pemahaman guru terhadap keterlaksanaan peran Komite Sekolah di Kabupaten Bantul. Dari *coding sheet* diterjemahkan kedalam distribusi frekuensi. Rata-rata (*mean*) atau lebih tepatnya disebut rata-rata hitung (*arithmetic mean*) merupakan ukuran gejala pusat yang sering digunakan. Rata-rata dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai dibagi oleh jumlah (banyaknya/frekuensi) subjeknya (Furqon, 2008:41). Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang penilaian yang diberikan oleh para responden terhadap suatu indikator. Nilai yang diberikan oleh para responden berada pada rentang 1 – 4 skala Likert. Nilai dari para responden tersebut selanjutnya diolah untuk mencari rata-rata penilaian dalam suatu kelompok responden. Di samping menentukan nilai rata-rata kelompok responden, peneliti juga menghitung nilai rata-rata gabungan ketiga kelompok responden. Perhitungan nilai rata-rata gabungan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti membuat kesimpulan penilaian terhadap suatu indikator.

3. Modus

Modus distribusi adalah nilai atau skor pada tabel distribusi yang frekuensi kemunculannya tinggi. Penggunaan modus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap nilai rata-rata, dimana melalui modus akan terlihat kecenderungan para responden dalam suatu kelompok memberikan penilaian tertentu pada suatu indikator.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian evaluasi keterlaksanaan peran komite sekolah ditinjau dari peningkatan mutu pembelajaran di Sekolah Dasar se-Kabupaten Bantul menekankan dua hal utama yaitu melakukan penggambaran (*description*) dan pertimbangan (*judgments*). Dua hal ini diperoleh melalui penggambaran terhadap tahap pendahuluan (*antecedent*), tahap proses (*transaction*), dan tahap hasil (*outcomes*).

1. Tahap input dan perencanaan (*Antecedent Phase*)

Antecedent Phase atau fase input/perencanaan mendeskripsikan pemahaman guru terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah, yang terdiri dari: konsep Komite Sekolah, fungsi dan tujuan, dan manfaat. Hasil penggambaran tahap input dan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Pemahaman terhadap rancangan program implementasi komite sekolah

| No | Rentang skor | Kriteria | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | $\geq 44,4$ | Sangat Baik | 25 | 23 |
| 2. | 37,7-44,3 | Baik | 14 | 13 |
| 3. | 31,1-37,6 | Kurang | 55 | 51 |
| 4. | $< 31,1$ | Sangat kurang | 14 | 13 |
| | | Jumlah | 108 | 100 |
| | | Persentase kategori baik | | 36% |
| | | Persentase kategori kurang | | 64% |
| | | Mean/rerata | | 37,8 |
| | | Standar deviasi | | 6,7 |

Jumlah responden dengan kondisi berkategori sangat baik untuk pemahaman terhadap rancangan program implementasi komite sekolah sebanyak 25 (23%), kategori baik 14 (13%). Data yang masuk kategori baik sebanyak 36%. Data kategori kurang sebanyak 55 (51%), kategori sangat kurang 14 (13%). Data yang masuk kategori kurang sebanyak 64%.

Deskripsi data dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:

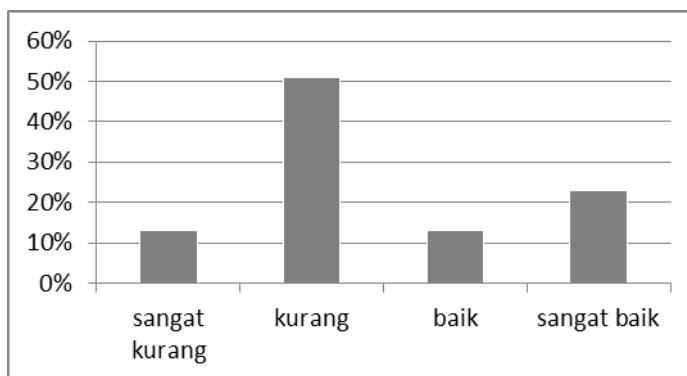


Diagram 1. Pemahaman terhadap rancangan program implementasi komite sekolah

2. Fase Pelaksanaan (*Transaction Phase*)

Transaction Phase atau tahap pelaksanaan mendeskripsikan pelaksanaan/implementasi peran Komite Sekolah di Bantul. Implementasi program Komite Sekolah meliputi: pelaksanaan administrasi dan organisasi atau tata pamong, pelaksanaan manajemen atau tata kelola, dan pelaksanaan proses implementasi peran Komite Sekolah yang terangkum dalam 4 peran yaitu peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah sebagai pendukung, peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan peran komite sekolah sebagai mediator. Dari hasil analisis data responden, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Implementasi program komite sekolah

| No | Rentang skor | Kriteria | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | $\geq 81,4$ | Sangat Baik | 11 | 11 |
| 2. | 66,5-81,3 | Baik | 47 | 47 |
| 3. | 51,5-66,4 | Kurang | 20 | 20 |
| 4. | $< 51,5$ | Sangat kurang | 22 | 22 |
| | | Jumlah | 100 | 100 |
| | | Persentase kategori baik | | 58% |
| | | Persentase kategori kurang | | 42% |
| | | Mean/rerata | | 66,5 |
| | | Standar deviasi | | 14,9 |

Data termasuk kategori sangat baik sebanyak 11 %, baik sebanyak 47%, kurang sebanyak 20%, dan sangat kurang sebanyak 22%. Jadi data

implementasi program komite sekolah yang masuk kategori baik sebanyak 58 % sedangkan yang masuk kategori kurang sebanyak 42%.

Deskripsi data dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:

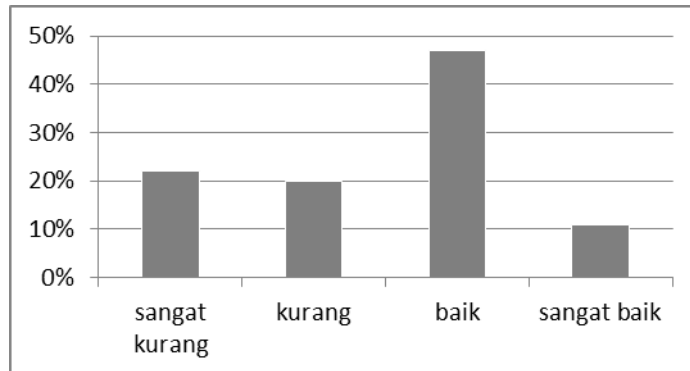


Diagram 2. Implementasi Program Komite Sekolah

Data implementasi program komite sekolah dikategorikan menjadi 4 yaitu peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah sebagai pendukung, peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan peran komite sekolah sebagai mediator. Deskripsi data untuk masing-masing peran sebagai berikut:

Tabel 3. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan

| No | Rentang skor | Kriteria | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | $\geq 24,8$ | Sangat Baik | 22 | 22 |
| 2. | 20,2-24,7 | Baik | 32 | 32 |
| 3. | 15,6-20,1 | Kurang | 25 | 25 |
| 4. | $< 15,6$ | Sangat kurang | 21 | 21 |
| | | Jumlah | 100 | 100 |
| | | Persentase kategori baik | | 54% |
| | | Persentase kategori kurang | | 46% |
| | | Mean/rerata | | 20,2 |
| | | Standar deviasi | | 4,6 |

Dilihat dari peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, sebanyak 54 % masuk kategori baik dan sebanyak 46% masuk kategori kurang.

Tabel 4. Peran komite sekolah sebagai pendukung

| No | Rentang skor | Kriteria | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | $\geq 17,5$ | Sangat Baik | 21 | 21 |
| 2. | 14,2-17,4 | Baik | 36 | 36 |
| 3. | 10,8-14,1 | Kurang | 22 | 22 |
| 4. | $< 10,8$ | Sangat kurang | 21 | 21 |
| | | Jumlah | 100 | 100 |
| | | Persentase kategori baik | | 57% |
| | | Persentase kategori kurang | | 43% |
| | | Mean/rerata | | 14,2 |
| | | Standar deviasi | | 3,3 |

Peran komite sekolah sebagai pendukung menurut responden yang masuk kategori baik sebanyak 57% dan data yang masuk kategori kurang sebanyak 43%.

Tabel 5. Peran komite sekolah sebagai pengontrol

| No | Rentang skor | Kriteria | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | $\geq 20,0$ | Sangat Baik | 9 | 9 |
| 2. | 15,9-19,9 | Baik | 42 | 42 |
| 3. | 11,7-15,8 | Kurang | 39 | 39 |
| 4. | $< 11,7$ | Sangat kurang | 10 | 10 |
| | | Jumlah | 100 | 100 |
| | | Persentase kategori baik | | 51% |
| | | Persentase kategori kurang | | 49% |
| | | Mean/rerata | | 15,9 |
| | | Standar deviasi | | 4,2 |

Data tentang peran komite sekolah sebagai pengontrol yang menunjukkan kategori baik adalah 51%, sedangkan kategori kurang 49%.

Tabel 6. Peran komite sekolah sebagai mediator

| No | Rentang skor | Kriteria | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | $\geq 20,1$ | Sangat Baik | 11 | 11 |
| 2. | 16,2-20,0 | Baik | 41 | 41 |
| 3. | 12,3-16,1 | Kurang | 24 | 24 |
| 4. | $< 12,3$ | Sangat kurang | 24 | 24 |
| | | Jumlah | 100 | 100 |
| | | Persentase kategori baik | | 52% |
| | | Persentase kategori kurang | | 48% |
| | | Mean/rerata | | 16,2 |
| | | Standar deviasi | | 3,9 |

Data tentang peran komite sekolah sebagai mediator yang masuk kategori baik sebanyak 52, dan kategori kurang 48.

3. Tahap Hasil Program (*Output Phase*)

Output Phase atau tahap hasil program mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi implementasi peran Komite Sekolah SD di Kabupaten Bantul. Dari hasil implementasi program komite sekolah, dilaksanakan evaluasi keterlaksanaan. Data input menunjukkan pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah sebesar 36%. Data implementasi program komite sekolah menunjukkan bahwa program komite sekolah telah terlaksana sebanyak 58%. Dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan program komite sekolah sebesar 47%.

B. Hasil Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu input dan perencanaan (*Antecedent Phase*), proses/pelaksanaan (*Transaction Phase*), dan hasil/evaluasi (*outcomes Phase*). Pada masing-masing tahapan akan dilihat (secara horisontal) kesesuaiannya (*congruence*) antara perencanaan (*intents*) dan data hasil implementasi yang diperoleh dari observasi lapangan (*observations*). Jika terdapat ketidaksesuaian maka akan diberikan pertimbangan/saran/masukan terhadap implementasi program komite sekolah sesuai kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya akan dilihat pula kesenjangan yang ada pada masing-masing tahapan.

Analisis lanjutan untuk mencari kesesuaian (*congruence*) antara pelaksanaan program komite sekolah yang diharapkan (*intended*) sesuai standar dengan yang diamati (*observed*) pada masing-masing tahapan.

Tabel 7. Data hasil evaluasi implementasi program komite sekolah

| Tahapan | ASPEK | Description matrix | | Judgment matrix | |
|---------------------------------------|--|---|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | Intents | Observations | Standards | Judgments |
| Input dan Perencanaan (Antecedent) | Pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah | Konsep Komite Sekolah, fungsi dan tujuan, dan manfaat | 36% | 100% | Belum sesuai, diberikan pertimbangan |
| Proses (Transaction) | Implementasi program komite sekolah | Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan | 54% | 100% | Belum sesuai, diberikan pertimbangan |
| | | Peran komite sekolah sebagai pendukung | 57% | 100% | Belum sesuai, diberikan pertimbangan |
| | | peran komite sekolah sebagai pengontrol | 51% | 100% | Belum sesuai, diberikan pertimbangan |
| | | Peran komite sekolah sebagai mediator | 52% | 100% | Belum sesuai, diberikan pertimbangan |
| Hasil (outcomes) | Evaluasi implementasi peran Komite Sekolah | Evaluasi keterlaksanaan | 47% | 100% | Belum sesuai, diberikan pertimbangan |

Evaluasi terhadap tahap input dan perencanaan (*Antecedent Phase*) diperoleh hasil deskripsi terhadap observasi di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan angket sebesar 36% sesuai standar. Frekuensi data dari responden terbanyak/modus data menunjukkan bahwa pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran komite sekolah pada tingkat “memahami”/skala 3 (pada skala 1-4). Angka tersebut telah masuk kategori baik namun karena data responden dibandingkan dengan data responden lainnya dalam suatu populasi berdasarkan analisis data menurut Djemari Mardapi (2008:123), maka skor responden yang masuk kategori baik harus lebih tinggi dari rata-rata/mean ditambah simpangan baku (mean sebesar 37,8 dan simpangan baku sebesar 6,7).

Evaluasi yang dilakukan terhadap tahap pelaksanaan peran program komite sekolah sebesar 58% masuk kategori baik. Adapun perincian untuk masing-

masing peran yaitu peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah sebagai pendukung, peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan peran komite sekolah sebagai mediator. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan berkategori baik sebesar 54%. Peran komite sekolah sebagai pendukung berkategori baik sebesar 57%. Peran komite sekolah sebagai pengontrol berkategori baik sebesar 51%. Peran komite sekolah sebagai mediator berkategori 52% berkategori baik.

Evaluasi pada tahap hasil pelaksanaan program Komite Sekolah (*Outcomes Phase*) yang dirangkum dari tahap input dan pelaksanaan diperoleh data sebesar 47% berkategori cukup.

C. Pembahasan

Data yang diperoleh dari hasil analisis, untuk selanjutnya diberikan pertimbangan (*judgments*) mengenai pemenuhan terhadap standar yang ada. Saran dan rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan data yang belum terpenuhi dengan melihat hambatan/kendala yang masih dijumpai.

Hasil evaluasi terhadap tahap input dan perencanaan (*Antecedent Phase*) yang dilakukan terhadap pelaksanaan program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah berkategori cukup dengan persentase 36%. Pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah meliputi konsep, fungsi dan tujuan, serta manfaat Komite Sekolah. Pemahaman awal terhadap rancangan program implementasi peran komite sekolah penting untuk dimiliki agar masing-masing pemangku kepentingan baik guru, kepala sekolah, anggota komite sekolah, dan masyarakat mempunyai pengetahuan yang akan digunakan untuk menyusun/merencanakan, dan melakukan langkah pelaksanaan program komite sekolah. Pemahaman terhadap rancangan program peran komite sekolah harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran komite sekolah.

Pertimbangan untuk meningkatkan pemahaman terhadap rancangan program komite sekolah adalah dengan sering adanya pertemuan/koordinasi antar

semua pihak baik guru, kepala sekolah, komite sekolah, wali siswa, dan masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk menyamakan pandangan tentang konsep, peran, fungsi dan manfaat komite sekolah. Pihak sekolah dengan komite juga hendaknya melibatkan pemangku kebijakan lainnya seperti pengawas sekolah dan dinas pendidikan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja komite sekolah. Sekolah bisa juga melakukan kajian terhadap kinerja komite sekolah di sekolah yang lain yang telah berhasil melaksanakan program kerja komite sekolah dengan baik.

Hasil evaluasi terhadap tahap implementasi menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah melaksanakan peran program komite sekolah dengan kategori baik yaitu sebesar 58% (rentang 51-75%). Komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah terlaksana sebesar 54%. Tingkat jawaban responden terhadap pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dengan frekuensi terbanyak/modus pada jawaban skala “tinggi” (3 untuk rentang skala 1-4) yaitu terkait intensitas pemberian pertimbangan dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, peran komite sekolah dalam pemberi pertimbangan terhadap pengembangan bakat minat siswa, terhadap guru dalam mengelola kelas, terhadap penggunaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, penciptaan lingkungan kondusif untuk belajar, dan juga memberi dampak dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Bahkan untuk butir pernyataan tentang keberadaan komite sekolah di sekolah, mayoritas jawaban “sangat tinggi” (4 untuk rentang skala 1-4).

Peran komite sekolah sebagai pendukung terhadap sekolah telah terlaksana dengan kategori baik dengan persentase 57%. Mayoritas responden menjawab dengan skala tinggi (3 untuk rentang skala 1-4). Sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan peran program komite sekolah telah terlaksana dengan baik. Adapun untuk indikator pelaksanaan peran komite sebagai pendukung sekolah adalah dalam hal sebagai berikut: 1) peran sebagai pendukung dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; 2) Dukungan Komite Sekolah dalam pemanfaatan

sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; 3) Dukungan Komite Sekolah dalam pengembangan minat dan bakat siswa dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; 4) Dukungan Komite Sekolah dalam pengembangan prestasi belajar siswa dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; serta 5) Dampak dukungan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol juga telah terlaksana dengan kategori baik yaitu sebesar 51%. Peran sebagai pengontrol yang telah dilakukan dengan skala jawaban tinggi dari responden pada hampir semua indikator diantaranya: upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, dalam mengontrol prestasi belajar siswa dalam pembelajaran di sekolah, dalam mengontrol guru terkait pengelolaan kelas di sekolah, dalam mengontrol prestasi belajar siswa di sekolah, sebagai pengontrol memberi dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun satu indikator yang mayoritas dijawab hanya dengan kategori cukup (skala 2 dari rentang skala 1-4) adalah peran Komite Sekolah dalam mengontrol proses pembelajaran di sekolah.

Komite sekolah belum dapat mengontrol proses pembelajaran di sekolah dengan baik dikarenakan keberadaan komite sekolah tidak berada di kelas/di sekolah setiap saat. Hal tersebut bisa disiasati dengan adanya koordinasi yang baik antara komite sekolah dengan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah yang memiliki kontrol penuh terhadap sekolah. Kepala sekolah juga selalu memiliki agenda untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Komite dapat melakukan kontrol terhadap proses pembelajaran di sekolah dari hasil pengamatan dan laporan kepala sekolah. Sehingga komite dapat memberikan saran/masukan/kritik terkait peran sebagai pengontrol. Keberadaan komite sekolah sebagai langkah untuk menindaklanjuti adanya saran/kritik/keluhan terhadap suatu satuan pendidikan sesuai dengan PP No 17 tahun 2010 pasal 196 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap proses pembelajaran di sekolah adalah dengan memberikan/memasang fasilitas CCTV yang rekamannya bisa dilihat langsung oleh komite sekolah setiap saat. Hal ini telah dilakukan di SD Unggulan Aisyiyah Bantul sesuai penelitian dari Fandhi Yusuf (2015: 104). Dengan adanya CCTV, maka kontrol bisa dilakukan oleh komite sekolah melalui pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah yang memiliki wewenang langsung terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah.

Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator telah terlaksana dengan baik pula yaitu dengan kategori baik sebesar 52%. Modus jawaban dengan skala “tinggi” (skala 3 dari rentang 1-4) pada indikator menjalin hubungan sesama warga sekolah internal di sekolah, dalam menjalin hubungan dengan pihak luar sekolah disekolah, upaya Komite Sekolah dalam merintis kerjasama dengan pihak luar sekolah. Sedangkan indikator hubungan Komite Sekolah dengan pihak luar sekolah dan dampak Peran Komite Sekolah sebagai mediator terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah masih dalam skala cukup (skala 2 dari rentang skala 1-4).

Keanggotaan komite sekolah dapat melibatkan masyarakat sekitar yang perhatian terhadap dunia pendidikan dan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan serta bermacam profesi. Manakala pihak sekolah akan mengadakan kerja sama dengan pihak luar maka bisa menghubungi anggota komite sekolah. Penting untuk diperhatikan dalam pembentukan organisasi Komite Sekolah yang menganut prinsip (1) demokratis, (2) transparansi, dan (3) akuntabel sesuai pendapat Sri Renani Pantjastuti (2008: 86).

Pada masing-masing tahapan belum memenuhi standar 100%, namun telah terlaksana sebagian dan berkategori baik. Adapun pertimbangan/saran/masukan yang diberikan terhadap implementasi peran program komite sekolah adalah dengan mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dengan memberikan wadah bagi komite sekolah untuk bisa melaksanakan perannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fandhi Yusuf (2015: 103) di SD Unggulan Aisyiyah Bantul, komite sekolah dan wali murid memiliki wadah untuk bisa memberikan dukungan, pertimbangan, maupun kontrol terhadap sekolah

melalui forum dewan kelas. Dewan kelas merupakan forum pertemuan/silaturahmi yang terdiri dari guru, kepala sekolah, wali kelas, dan komite sekolah. Dewan kelas melakukan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali. Komite sekolah juga diberi wadah untuk menyalurkan aspirasi terkait pemberian pertimbangan dalam forum rapat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan uji kurikulum saat awal tahun ajaran baru.

Komite dapat melakukan dukungan terhadap sekolah terkait dengan dukungan perencanaan program sekolah. Hal yang juga dilakukan oleh Komite Sekolah di SMA I Tuntang Semarang melalui pelibatan komite sekolah dalam penyusunan rencana dan program sekolah, RAPBS, pelaksanaan program pendidikan dan penyelenggaraan akuntabilitas pendidikan (Ninik, 2011: 1).

Komite sekolah perlu juga menyusun rancangan kegiatan selama satu tahun pada awal tahun ajaran baru sehingga langkah kerja bisa dipetakan. Dengan adanya rancangan kegiatan, akan menjadi pedoman dalam melangkah. Selanjutnya perlu adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dalam sebuah rapat/pertemuan komite sekolah dengan melibatkan semua unsur di sekolah untuk mengetahui keterlaksanaan program kerja komite yang telah dirancang di awal tahun ajaran baru.

Setelah dilakukan deskripsi terhadap masing-masing tahapan dalam implementasi peran program komite sekolah, dan dilakukan perbandingan antara harapan sesuai standar dengan keadaan implementasi sebenarnya di lapangan, selanjutnya dilihat kesenjangan antar tahapan secara vertikal.

Berikut bagan proses deskripsi data model stake:

Tabel 34. Bagan Pengolahan Data Deskripsi Model Stake

| Keadaan yang diharapkan (<i>intented</i>) | | | Keadaan yang Sebenarnya (<i>observed</i>) |
|---|------|-----------------|--|
| <i>Antecedent</i> Pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah | 100% | Kesesuaian ↔ | 36% |
| ↕ Kesenjangan ↕ | | | ↕ Kesenjangan ↕ |

| | | | |
|--|------|--------------|-----------------------|
| <i>Transaction</i> Implementasi program komite sekolah | 100% | ←Kesesuaian→ | 58% |
| ↕ Kesenjangan ↕ | | | ↕ Kesenjangan ↕ |
| <i>Outcomes</i> Evaluasi implementasi peran Komite Sekolah | 100% | ←Kesesuaian→ | 47% |

Dari bagan proses deskripsi data model Stake ini, dapat dianalisis secara vertikal/atas bawah antara tahap *antecedent* (pendahuluan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil). Pada kondisi yang diharapkan (*intended*), ketiga tahap memiliki persentase 100% artinya tidak ada kesenjangan antara ketiga tahap. Namun dalam kondisi sebenarnya (*observed*), terdapat kesenjangan persentase antara ketiga tahap.

Terdapat kesenjangan antara *antecedent* (pendahuluan) dan *transaction* (proses). *Antecedent* sebesar 36% dan *transaction* sebesar 58%. Dari kedua tahapan tersebut, ada kenaikan sebesar 22%. Walaupun pada tahapan *antecedent* terdapat kekurangan pada aspek-aspeknya, namun yang terjadi pada tahapan *transaction* (proses) ada peningkatan. Berarti proses yang terjadi selama pelaksanaan program komite sekolah lebih baik. Proses pelaksanaan peran komite meliputi peran pendukung, pengontrol, pengembangan, dan mediator. Masing-masing aspek dan pelaksana di lapangan bisa saling bersinergi untuk pelaksanaan program yang baik.

Kesenjangan juga terjadi antara *transaction* (proses) dan *outcomes* (hasil). *Transaction* (proses) dengan persentase 58% sedangkan *outcomes* (hasil) dengan persentase 47%. Kesenjangan pada kedua tahap tersebut ada penurunan sebesar 11%. Kegiatan evaluasi keterlaksanaan program komite sekolah belum dilakukan secara menyeluruh dan menjadi keterbatasan penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap *antecedent* (input dan perencanaan)
Pemahaman terhadap rancangan program implementasi peran Komite Sekolah belum sepenuhnya sesuai standar dan berkategori cukup dengan persentase 36%.
2. Tahap *transaction* (proses implementasi peran program komite sekolah)
Implementasi program komite sekolah telah terlaksana dengan kategori baik dengan persentase 58%.
3. Tahap *outcomes* (evaluasi keterlaksanaan program)
Evaluasi implementasi peran Komite Sekolah terhadap tahap *antecedent* dan *transaction* masuk kategori cukup dengan persentase 47%.

B. Implikasi

Hasil penelitian terhadap evaluasi implementasi peran program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul belum semua aspek memenuhi standar 100%. Oleh karena itu, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja dari semua pihak. Pihak sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan peran komite sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dengan melakukan koordinasi antar semua pihak maka pelaksanaan peran program komite sekolah akan lebih optimal. Komite sekolah dapat meningkatkan peran dukungan, pengembangan, kontrol, dan mediasi dengan memanfaatkan temuan penelitian ini.

C. Saran

1. Peningkatan koordinasi antar semua pihak baik guru, kepala sekolah, komite sekolah, wali siswa, dan masyarakat dalam menyamakan pandangan tentang konsep, peran, fungsi dan manfaat komite sekolah.

2. Sekolah bisa juga melakukan kajian terhadap kinerja komite sekolah di sekolah yang lain yang telah berhasil melaksanakan program kerja komite sekolah dengan baik.
3. Pengurus Komite Sekolah lebih meluangkan waktu untuk melaksanakan peran dan fungsinya di sekolah.
4. Keanggotaan komite sekolah dapat melibatkan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan serta bermacam profesi.
5. Komite sekolah hendaknya menyusun rancangan kegiatan selama satu tahun pada awal tahun ajaran baru sehingga langkah kerja bisa dipetakan.
6. Hendaknya diadakan evaluasi kinerja komite sekolah dengan melibatkan semua unsur di sekolah untuk mengetahui keterlaksanaan program kerja komite yang telah dirancang di awal tahun ajaran baru.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid. 2011. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dimiyati dan mujiono. 2013. *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: rineka cipta.
- Hamzah B. Uno. 2006. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Kiki Sukinawan. *Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu*. Skripsi tidak diterbitkan. FIP UNY.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Medologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2007). *Medologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Maman Rachman. 1997. *Manajemen Kelas*. Semarang: departemen pendidikan dan Kebudayaan direktorat jendral pendidikan tinggi proyek pendidikan guru Sekolah dasar (primary school teacher development project)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rusman. 2013. *Model-model pembelajaran mengembangkan profesionalitas guru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Cetakan III, Bandung: PT. Tarsito.

Syaiful Sagala. (2007). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tatang M. Amirin. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

Wahyu Adhi Nugroho. Peran Komite Sekolah dalam Pemberdayaan Sekolah Di SD Negeri Gunungpring 02 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Skripsi tidak diterbitkan. FIP UNY.

Wina Sanjaya. 2010. *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media

_____. 2014. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

I. Lampiran

1. Rincian Biaya
2. Curriculum vitae
3. Surat keterangan dari Ketua Jurusan tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian

Lampiran 1. Rincian Biaya

Adapun rincian biaya sebagaimana tercantum pada table berikut ini,

a. Upah/Honorarium

| Tim peneliti | Jumlah Orang | Jumlah Bulan | Juml. Minggu/bulan | Juml jam/minggu | Tarif/jam (Rp) | Total (Rp) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Dosen | 3 | 6 | 4 | 2 | 30.000 | 1.440.000 |
| Mahasiswa | 3 | 6 | 4 | 2 | 15.000 | 1.440.000 |
| Subtotal | | | | | | 2.880.000 |

b. Perjalanan dinas/transportasi

| Tim peneliti | Jumlah Orang | Jumlah Bulan | Juml. Minggu/bulan | Juml jam/minggu | Tarif/jam (Rp) | Total (Rp) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Ketua | 1 | 6 | 4 | 2 | 22.500 | 1.080.000 |
| Anggota | 2 | 6 | 4 | 2 | 15.000 | 1.440.000 |
| Subtotal | | | | | | 2.520.000 |

c. Bahan habis pakai

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Alat Tulis Kantor (ATK) | |
| a. Kertas HVS A4: 3 rim | 90.000 |
| b. Flash disk 4 gb: 1 bh | 120.000 |
| c. Catridge printer HP D2466: 2 psg | 450.000 |
| d. Refill tinta black : 1 btl | 45.000 |
| e. Refill tinta colour : 1 btl | 60.000 |
| f. Kertas folio bergaris: 2 rim | 45.000 |
| g. Block note: 60 eksp | 300.000 |
| h. Bulpoint: 2 box | 75.000 |
| i. Buku tulis | 120.000 |
| j. Compack disk (CD) blank: 3 kpg | 15.000 |
| Cetak foto/video: 100.000 | 150.000 |
| Subtotal | 1.470.000 |

c. Analisa data dan laporan

| | |
|---|-----------|
| Biaya download internet untuk penelusuran pustaka | 150.000 |
| Pemeliharaan perangkat computer | |
| - Pemeliharaan perangkat lunak: 10 bln | 180.000 |
| - Pemeliharaan perangkat keras: 10 bln | 180.000 |
| Penggalian data | 1.500.000 |
| Dokumentasi penelitian | 675.000 |
| Analisis data (dosen): 4 orang × 15 hari × 20.000 | 1.200.000 |
| Analisis data (mahasiswa): 2 orang x 15 x 20.000 | 600.000 |
| Penulisan, penggandaan, dan pengiriman laporan | 600.000 |

| | |
|--|------------------|
| Desiminasi dan Publikasi Jurnal Ilmiah | 2.250.000 |
| Subtotal | 7.335.000 |

d. Lain lain

| | |
|------------------------------|---------|
| Biaya konsumsi dan lain-lain | 795.000 |
|------------------------------|---------|

3. Rekapitulasi anggaran biaya penelitian:

| No. | Komponen pembiayaan | Jumlah uang (Rp) |
|---|------------------------|--|
| 1 | Upah/honorarium | 2.880.000 |
| 3 | Perjalanan dinas | 2.520.000 |
| 4 | Bahan aus/habis pakai | 1.470.000 |
| 5 | Analisa dan laporan | 7.335.000 |
| 6 | Konsumsi dan Lain lain | 795.000 |
| Total anggaran biaya penelitian. | | 15.000.000 <i>(Lima belas juta rupiah)</i> |

Lampiran 2. CV Pelaksana Penelitian

1. Ketua Peneliti

Nama : Dr. Ali Mustadi, M.Pd
NIP : 19780710 200801 1 012
Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 10 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/IIId
Jabatan Akademik : Lektor
Bidang Keahlian : Pembelajaran Bahasa di SD
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Unit Kerja/Jurusan/Prodi : FIP/PPSD/PGSD
Alamat PT : Karangmalang, Jl . Colombo, Yogyakarta,
55281
Telepon / Faksimili : (0274) 586168 / Fax. (0274) 540611
Alamat Rumah : Depok-Gandekan RT 3 Bantul, Bantul,
Bantul.
Telepon : Hp. 081328089490; 081903740088
Alamat E-mail : aly_uny@yahoo.com

2. Anggota Peneliti 1

Nama : Dr Enny Zubaidah, M.Pd
NIP : 19580822 198403 2 001
Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IVa/Pembina
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Bahasa dan Sastra Indonesia SD
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Unit Kerja/Jurusan/Prodi : FIP/PPSD/PGSD

3. Anggota Peneliti 2

Nama : HB. Sumardi, M.Pd
NIP : 19540515 198103 1 004
Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 Mei 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Katolik
Golongan / Pangkat : IVb/Pembina
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Bahasa dan Sastra Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Unit Kerja/Jurusan/Prodi : FIP/PPSD/PGSD

5. Anggota Peneliti (Mahasiswa 1)

Nama Lengka : Fandhi Yusuf
NIM : 11108241125
Jenis Kelamin : Laki-laki
Prodi : PGSD Kampus 2
Semester : VI

6. Anggota Peneliti (Mahasiswa 2)

Nama Lengka : Chandra Adhi Putra
NIM : 11108244020
Jenis Kelamin : Laki-laki
Prodi : PGSD Kampus 2
Semester : VI

7. Anggota Peneliti (Mahasiswa 3)

Nama Lengka : Regina Putri Pratiwi
NIM : 11108244065
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : PGSD Kampus 3
Semester : VI

Lampiran 3. Surat Keterangan Keterlibatan Mahasiswa

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dra. Hidayati, M. Hum
NIP : 195607211985012002
Fakultas/Jurusan/Prodi : FIP/PPSD/PGSD
Jabatan : Kajur PPSD

Menerangkan bahwa, penelitian yang diusulkan oleh:

Nama : Dr. Ali Mustadi, M. Pd
NIP : 19780710 200801 1 012
Fakultas/Jurusan/Prodi : FIP/PPSD/PGSD

Benar-benar akan melibatkan mahasiswa prodi PGSD dalam pelaksanaan penelitiannya. Adapun nama-nama mahasiswa tersebut adalah:

1. Nama Lengkap : Fandhi Yusuf
NIM : 11108241125
Jenis Kelamin : Laki-laki
Prodi : PGSD Kampus 2
Semester : VI
2. Nama Lengkap : Chandra Adhi Putra
NIM : 11108244020
Jenis Kelamin : Laki-laki
Prodi : PGSD Kampus 2
Semester : VI
3. Nama Lengkap : Regina Putri Pratiwi
NIM : 11108244065
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : PGSD Kampus 3
Semester : VI

Demikian surat keterangan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2015

Kajur PPSD,

Dra. Hidayati, M. Hum

NIP 195607211985012002